

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integrasi layanan publik. Namun, hasil evaluasi nasional menunjukkan bahwa indikator arsitektur SPBE masih memperoleh skor rendah yakni 2,63. Hal ini disebabkan salah satunya belum tersusunnya dokumen arsitektur sebagai acuan formal dalam mengintegrasikan proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan. Sebagian besar solusi sebelumnya bersifat parsial, tidak mengikuti prinsip arsitektur SPBE nasional, serta belum memanfaatkan pendekatan metodologis yang terstruktur, sehingga sistem yang dibangun cenderung terfragmentasi. Penelitian ini menghasilkan perancangan arsitektur SPBE berbasis *Enterprise Architecture*, disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022. Penelitian ini menghasilkan pemetaan proses bisnis, data dan informasi, layanan, serta aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Hasil rancangan telah divalidasi oleh pihak berwenang dan dinyatakan sesuai sepenuhnya dengan prinsip dan ketentuan arsitektur SPBE nasional. Rancangan ini dapat menjadi dasar integrasi SPBE yang lebih optimal dan berkelanjutan, serta meningkatkan nilai evaluasi SPBE di pemerintah kabupaten bangkalan.

Kata kunci: Arsitektur SPBE, Enterprise Architecture, E-Government, Kabupaten Bangkalan.

ABSTACT

The Bangkalan Regency Government has implemented the Electronic-Based Government System (SPBE) as an effort to improve the efficiency, transparency, and integration of public services. However, the national evaluation results indicate that the SPBE architecture indicator still scores low at 2.63. This is partly due to the absence of an architectural document as a formal reference for integrating business processes, data and information, services, applications, infrastructure, and security. Most of the previous solutions were partial, did not follow the principles of the national SPBE architecture, and had not yet utilized a structured methodological approach, resulting in fragmented systems. This research produces the design of SPBE architecture based on Enterprise Architecture, in accordance with Presidential Regulation Number 132 of 2022. This research produces a mapping of business processes, data and information, services, and applications within the Bangkalan Regency Government environment. The design results have been validated by the authorities and declared fully compliant with the principles and provisions of the national SPBE architecture. This design can serve as the basis for a more optimal and sustainable SPBE integration, as well as improve the SPBE evaluation score in the Bangkalan district government.

Keywords: *Architecture SPBE, Bangkalan Regency, Enterprise Architecture, E-Government.*